



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN JULI 2018

Pendahuluan

Komnas HAM merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat permintaan perlindungan yang terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 31 Juli 2018, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 374 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

Kategori Berkas Kasus										Total
Berkas Kasus Baru 1x					Berkas Lanjutan					
PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	
21	6	1	48	7	125	47	0	91	28	374

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	8	20	Kalimantan Barat	3
2	Sumatera Utara	33	21	Kalimantan Selatan	3
3	Bengkulu	2	22	Kalimantan Tengah	8
4	Jambi	4	23	Kalimantan Timur	5
5	Riau	10	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	14	25	Gorontalo	0
7	Sumatera Selatan	13	26	Sulawesi Selatan	5
8	Lampung	2	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	28	Sulawesi Tengah	5
10	Kepulauan Riau	8	29	Sulawesi Utara	1
11	Banten	10	30	Sulawesi Barat	0
12	Jawa Barat	34	31	Sulawesi Selatan Barat	0
13	DKI Jakarta	91	32	Maluku	19
14	Jawa Tengah	24	33	Maluku Utara	0
15	Jawa Timur	31	34	Papua	6
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	9	35	Papua Barat	0
17	Bali	3	36	Tanpa Alamat	13
18	Nusa Tenggara Barat	2			
19	Nusa Tenggara Timur	4		Jumlah	374

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Pemantauan dan penyelidikan	179
2	Mediasi	55
3	Tim	1
4	File	139
Jumlah		374

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	198
2	Tembusan	173
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	3
Jumlah		374

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	42
2	Pos	305
3	Fax	1
4	Email	20
5	Online	4
6	Audiensi	0
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	2
8	Jejaring Pengaduan	0
Jumlah		374

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	11
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
3	Hak mengembangkan diri	4
4	Hak memperoleh keadilan	102
5	Hak atas kebebasan pribadi	8
6	Hak atas rasa aman	20
7	Hak atas kesejahteraan	150
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	5
9	Hak perempuan	
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	4
12	Non HAM	68
Jumlah		374

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	4
Lingkungan hidup	7
	11
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	4

Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	0
	4
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	74
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	4
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	18
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
	99
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	2
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	
Berkumpul, berapat, dan berserikat	1
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	5
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	8
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	7
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	2
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	5
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	5
	20
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	4
Hak atas kepemilikan tanah	64

Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	41
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	12
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	24
Hak atas kesehatan	4
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	1
	150
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	4
	5
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	
	0
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	2
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	2
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	4
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	4
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	71
Jumlah Seluruh	374

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Pemerintah daerah	1
2	Korporasi	4
3	Individu - Orang seorang	152
4	Individu - Anak	5
5	Individu - Perempuan	1
6	Individu - Buruh migran	1
7	Individu - Pekerja/Profesi	24
8	Individu - Ras dan etnis	1
9	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
10	Individu - Lansia	1
11	Individu - Fakir Miskin	
12	Individu - Narapidana	7
13	Kelompok - Masyarakat	92
14	Kelompok - Pekerja	20
15	Kelompok - Masyarakat Adat	5
16	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	4
17	Kelompok - LGBT	1
18	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
19	Organisasi	1
20	Warga Negara Asing (WNA)	3
21	Tanpa Keterangan Pihak Korban	49

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah Berkas
1	Pemerintah pusat (kementerian)	31
2	Pemerintah daerah	35
3	Lembaga negara (non kementerian)	3
4	Lembaga peradilan	19
5	POLRI	87
6	TNI	11
7	Kejaksaan	5
8	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	7
9	Korporasi	70
10	BUMN/BUMD	26
11	Lembaga pelayanan kesehatan	2
12	Lembaga pendidikan	10
13	Individu - Orang seorang	4
14	Individu - Pekerja/Profesi	3
15	Kelompok - Masyarakat	8
16	Organisasi	3
17	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	50

Jakarta, 1 Agustus 2018
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim